



# LKPJ

## Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Utara

**TAHUN ANGGARAN 2024**



# { Kata Pengantar }-----



**Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

” **Terima Kasih dan Penghargaan kepada seluruh pegawai DKP Kaltara serta stakeholder yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan DKP Tahun 2024.** ”

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

LKPJ ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 demi terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan, dan pemikiran yang bersifat membangun, semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan utara serta Peningkatan Kinerja pada tahun mendatang

Tanjung Selor, 21 Januari 2025

Kepala Dinas



**Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi**

19680712 199103 1 020



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	11
<b>BAB 2 Perubahan Penjabaran Anggaran</b> .....	<b>12</b>
2.1 Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.....	14
2.2 Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2024 .....	22
2.3 Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau Tahun 2024 .....	26
2.4 Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tahun 2024 .....	30
<b>BAB 3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</b> .....	<b>34</b>
3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .....	34
3.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya .....	37
3.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja .....	49
3.4 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	54
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya ...	55



<b>BAB 4 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan .....</b>	<b>55</b>
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan .....	57
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian .....	62
<b>DOKUMENTASI KEGIATAN.....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Sumberdaya Organisasi DKP dan UPTD .....	8
Tabel 2.1 Rincian alokasi anggaran .....	12
Tabel 2.2 Alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 .....	19
Tabel 2.3 Alokasi anggaran UPTD PMHP Tahun 2024 .....	23
Tabel 2.4 Alokasi anggaran UPTD PBLP Tahun 2024 .....	27
Tabel 2.5 Alokasi anggaran UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tahun 2024 .....	31
Tabel 3.1 Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas periode Tahun Anggaran 2024. ....	36
Tabel 3.2 Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas periode Tahun Anggaran 2024. ....	36
Tabel 3.2 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran DKP Tahun 2024 ....	31
Tabel 3.3 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran UPTD. PMHP Tahun 2024. ....	43
Tabel 3.4 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran UPTD. PBLP Tahun 2024. ....	43
Tabel 3.5 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran UPTD. PP Tengkeyu II Tahun 2024 .....	48
Tabel 3.6 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja .....	53



Tabel 3.6 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja .....	53
Tabel 3.7 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2024 .....	54
Tabel 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	56
Tabel 3.9 Identifikasi realisasi fisik dan keuangan tugas pembantuan Tahun 2024.....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DKP .....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD. PMHP .....	5
Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPTD PBLP .....	6
Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPTD. PPT II .....	7



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

#### **A. Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Adapun kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perikanan Tangkap;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perikanan Budidaya;



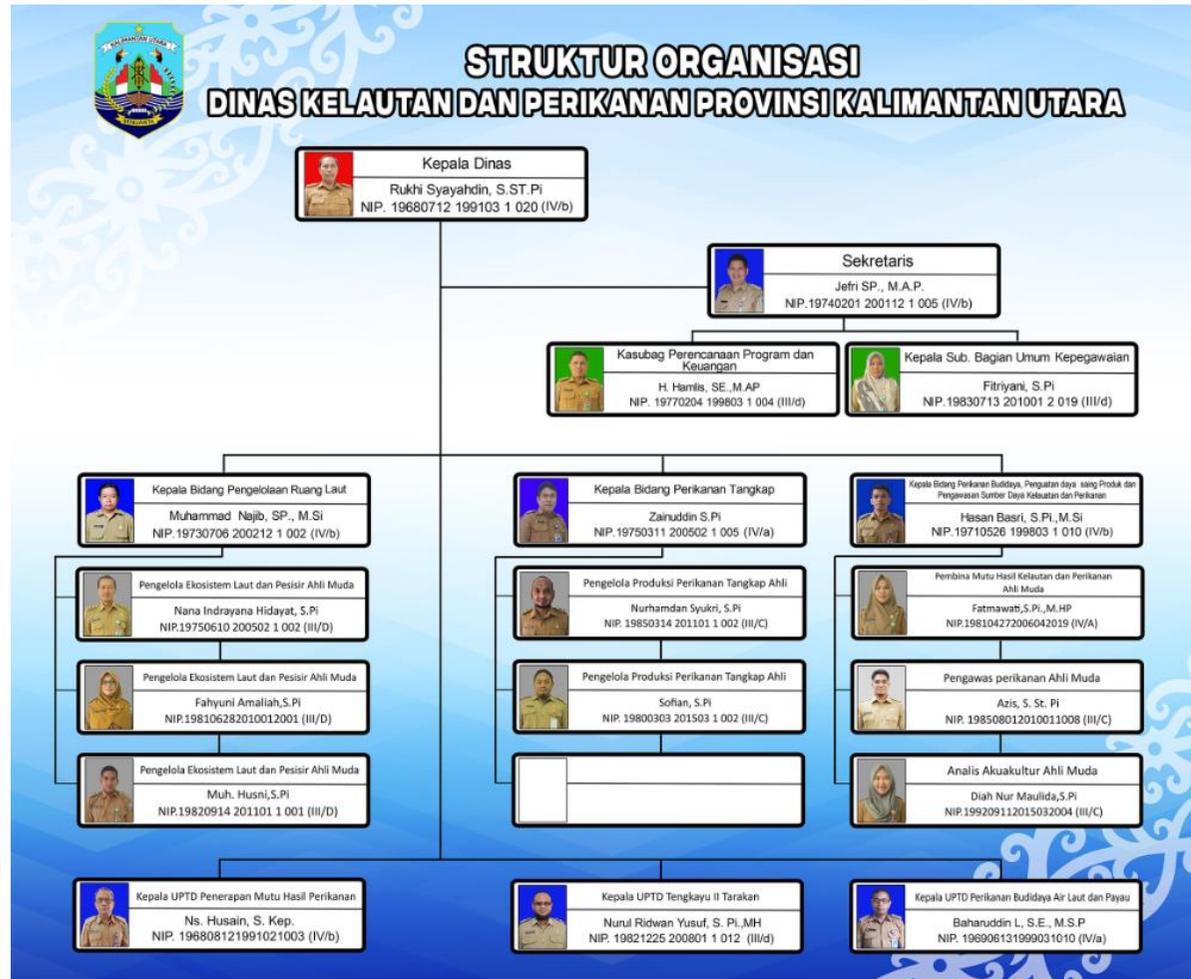
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas;
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.



**a. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan**



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi DKP**



Adanya perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang perikanan di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan maka ditetapkanlah UPTD kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya :

1. UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Tarakan;
2. UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau di Tarakan;
3. UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II di Tarakan;

#### **B. UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)**

UPTD. PMHP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan analisa bahaya pengendalian titik kritis (*Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) unit usaha perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan.

Untuk melaksanakan tugas UPTD PMHP, menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis balai pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
- b) Pembinaan dan pengawasan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit usaha perikanan;
- c) Pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan;
- d) Penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
- e) Pelaksanaan monitoring produk perikanan yang ada dipasar lokal;



- f) Pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- g) Penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
- h) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD. PMHP**

### C. UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau (PBLP)

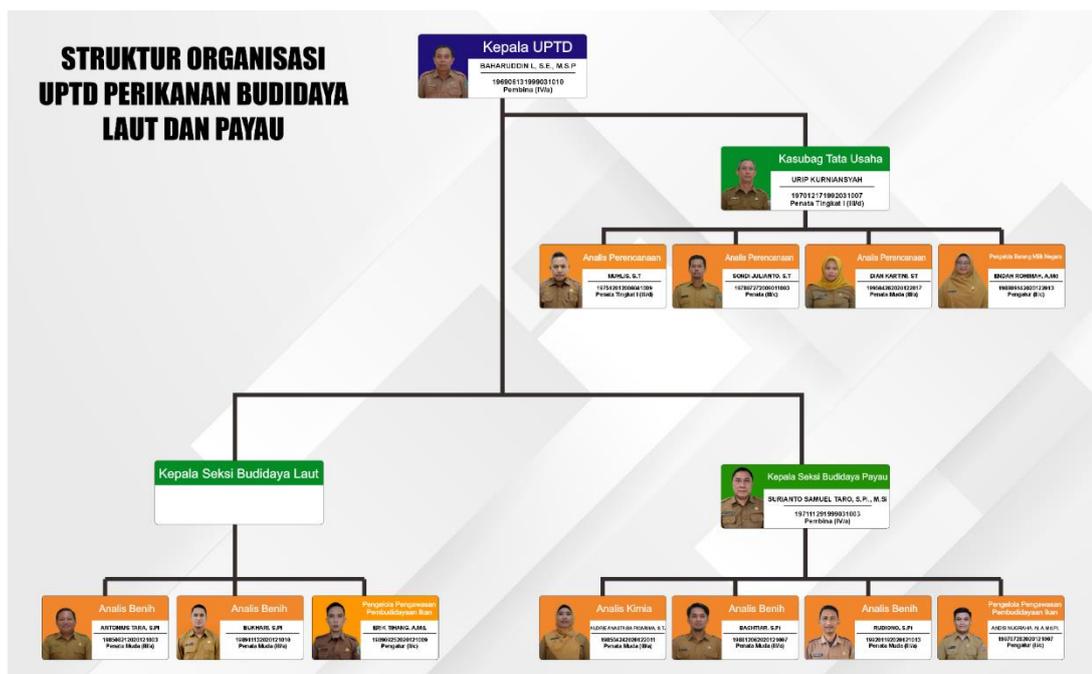
UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yaitu UPTD secara umum merupakan sarana bimbingan secara langsung kepada unit-unit UPR, Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dalam rangka pengadaan dan pengendalian mutu benih serta mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu.

Dalam melaksanakan tugas UPTD PBLP menyelenggarakan fungsi:

- a) Perbanyak dan pendistribusian benih perikanan laut dan payau;



- b) Penerapan inovasi teknologi perbenihan;
- c) Penyediaan dan pendistribusian telur, naupli dan benih perikanan laut dan payau;
- d) Penyediaan dan pendistribusian pakan alami untuk perikanan laut dan payau;
- e) Pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan yang baik;
- f) Pelaksanaan diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
- g) Pelestarian sumberdaya perikanan laut dan payau dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit perikanan laut dan payau; dan
- h) Pelaporan data produksi perbenihan secara berkala (triwulan), disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya up. Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.



**Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPTD PBLP**



## D. UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II melaksanakan pembinaan pengawasan melalui check point kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan multi fungsi dan terintegrasi, membantu kelancaran urusan tata pengusahaan dan kesyahbandaran kapal perikanan serta pusat informasi perikanan.

Dalam melaksanakan tugas UPTD PPT II, Menyelenggarakan fungsi:

- Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana serta pengusahaan pelabuhan.
- Pelayanan check point kapal perikanan, pengumpulan data statistik perikanan dan kesyahbandaran kapal perikanan.
- Koordinasi keamanan, ketertiban, kebersihan dilingkungan pelabuhan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan dan pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- Pelayanan multi fungsi dan terintegrasi dengan sektor penunjang lainnya.
- Pusat pelayanan dan sumber informasi data serta potensi perikanan.
- Pelaksanaan informasi data khusus pelabuhan perikanan.



**Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPTD. PPT II**



## E. SUMBERDAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai unit kerja perumus kebijakan bagi pimpinan daerah dan Pemerintah Daerah.

Berikut tabel jumlah SDM Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Perangkat Daerah	PNS (Orang)	PPPK (Orang)	PTT (Orang)	Jumlah (Orang)
Dinas Kelautan dan Perikanan	46	3	27	76
UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	7	0	1	8
UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau	14	0	2	16
UPTD. Pelabuhan Perikanan Tenggayu II	16	0	35	51
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>151</b>

*Tabel. 1.1 Tabel Sumberdaya Organisasi DKP dan UPTD*

## F. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Kalimantan Utara memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa di sektor perikanan, hasil laut terutama ikan merupakan sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis. Namun dengan berlimpahnya potensi tersebut belum dapat meningkatkan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara hal tersebut dibuktikan penurunan NTN pada bulan desember 2024 menjadi 103,82 yang mana pada tahun 2023 NTN mencapai 108,25. Ini menandakan kondisi kesejahteraan nelayan menurun disebabkan karena hasil tangkapan yang lebih rendah, peningkatan biaya bahan bakar dan adanya ketergantungan pada pasar lokal dengan harga jual yang tidak kompetitif.



Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan beberapa masalah dan akar masalah pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara:

### **1) Penangkapan ikan yang belum optimal**

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai dua Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dan UPTD. Pelabuhan Perikanan Tarakan (Tengkayu II) di Kota Tarakan. PPI, Secara umum tidak mampu untuk menampung kapal-kapal ikan dengan tonase besar yang dapat beroperasi sampai di ZEE (zona ekonomi eksklusif) di WPP 716. Kapal penangkap ikan di Provinsi Kalimantan Utara hampir semuanya kecil sehingga tidak mampu untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas.

Tidak adanya pelabuhan yang memadai tersebut menjadi penyebab utama belum adanya kapal ikan dengan tonase besar yang mendaratkan ikannya di Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu, keengganan kapal penangkap ikan bertonase besar untuk beroperasi di Kalimantan Utara juga disebabkan tingkat keamanan di laut yang belum memadai. Hal ini yang menyebabkan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut belum optimal di bandingkan dengan potensi lestari di WPP 716 dan produksinya jauh lebih rendah dibanding provinsi lain di Pulau Kalimantan akibat *fishing ground*-nya hanya di perairan pantai.

Dilihat dari rata-rata produksi tiap RTP juga masih sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata Nasional, sehingga NTN Provinsi Kalimantan Utara juga masih berada dibawah rata-rata nasional. Optimalisasi penangkap ikan disamping menghadapi kendala utama seperti telah dijelaskan di atas, juga masih kendala belum memadainya SDM baik secara kualitas dan kuantitas, dengan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta SDM yang memadai.

### **2) Budidaya Perikanan Belum Optimal**

Produksi perikanan budidaya dalam tiga tahun terakhir telah melampaui target produksi meskipun produktivitasnya masih rendah dibanding dengan potensi yang ada. Rata-rata produksi tambak di



Provinsi Kalimantan Utara dalam masih sangat rendah jika dibandingkan dengan produksi tambak udang intensif di Pulau Jawa. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan sistem budidaya yang digunakan masih sistem tradisional (ekstensif) dan belum menggunakan sistem semi intensif maupun intensif. Persoalan tersebut terkait dengan SDM belum memadai di bidang perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta terbatasnya aksesibilitas sarana produksi ikan (pakan dan obat-obatan) karena didatangkan dari pulau lain dan keterbatasan pasar. Disamping itu, rendahnya produktivitas budidaya perikanan salah satunya disebabkan oleh adanya konflik penggunaan lahan. Sebagian besar tambak berada di kawasan APL (area peruntukan lain), namun demikian terdapat tambak yang berada di kawasan hutan produksi sehingga pembinaan dan bantuan sarana produksi dari pemerintah di serta perbankan tidak dapat menjangkau. Ketersediaan benih ikan atau udang untuk budidaya di Provinsi Kalimantan Utara masih relatif terbatas dan belum tersebar di semua wilayah. Sehingga meskipun wilayahnya mempunyai potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, tetapi karena keterbatasan bibit, pakan dan teknologi maka budidaya ikan tidak dilakukan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, menyebabkan pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan masih belum optimal.

### **3) Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan Belum Berkembang**

Produk Kelautan dan Perikanan sebagian besar masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi lokal dan selebihnya diekspor ke berbagai negara baik melalui Nunukan, Makassar maupun Surabaya (Jawa). Ekspor produk kelautan dan perikanan dari Provinsi ini didominasi ikan segar/beku hasil tangkapan dari laut. Sedang komoditas ekspor yang merupakan hasil budidaya didominasi rumput laut yang diekspor dalam bentuk bahan baku/mentah (*raw meterial*). Sampai saat ini belum ada perusahaan pengolahan rumput laut menjadi produk keragenan atau agar. Sehingga hilirisasi dari produk kelautan dan perikanan masih belum memadai, tercermin dari sebagian besar produk kelautan dan



perikanan dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi daerah. Meskipun saat ini sudah terdapat kegiatan pasca panen produk produk perikanan yang dilakukan oleh 20 perusahaan menengah besar yang semuanya berlokasi di Kota Tarakan dan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Sebatik, Kabupaten Nunukan namun serapannya masih terlalu kecil dibanding produksi yang ada.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a) Maksud**

Penyusunan LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 secara transparan dan akuntabel

### **b) Tujuan**

Penyusunan LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 ditujukan untuk mendukung pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Akhir Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara.



## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN**

Pelaksanaan Program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara guna menyelesaikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan peraturan tersebut, alokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD Tahun Anggaran 2024 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 35.753.517.482,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>	<b>Bertambah/ berkurang (%)</b>
Dinas Kelautan dan Perikanan	27.663.055.516	32.059.755.516	4.396.700.000	+ 15,89%
UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	349.999.859	432.999.888	83.000.029	+23,71%
UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau	399.999.388	483.749.878	83.750.490	+20,94%
UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkatay II Tarakan	2.300.000.000	2.777.012.200	477.012.200	+20,74%
<b>Total</b>	<b>30.713.054.763</b>	<b>35.753.517.482</b>	<b>5.040.462.719</b>	<b>+16,41%</b>

**Tabel 2.1 Rincian alokasi anggaran**

Dari tabel 2.1 diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menerima peningkatan anggaran yang signifikan sebesar 15,89% peningkatan ini menunjukkan adanya prioritas baru dan penguatan program eksisting. Peningkatan anggaran ini dialokasikan untuk program-program strategis



seperti : Bantuan untuk nelayan dalam bentuk sarana penangkapan ikan dan bantuan untuk pembudidaya ikan dalam bentuk sarana budidaya ikan.

UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan menerima peningkatan anggaran sebesar 23,71% yang mana fokus utama UPTD. PMHP adalah meningkatkan kualitas hasil perikanan agar sesuai standar pasar terutama pasar ekspor. Penambahan anggaran diarahkan untuk kegiatan sosialisasi GMP (*Good Manufacturing Practices*) SSOP (*Standard Sanitation Operating Procedure*), monitoring keamanan pangan pasar, pembinaan pelaku usaha produk perikanan dan pembinaan unit pengolahan ikan (UPI).

UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau menerima peningkatan anggaran sebesar 20,94% yang mana fokus utama UPTD. PBLP adalah penyediaan bibit rumput laut dan bimbingan pembudidayaan bibit udang windu (Benur) pada Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT).

UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan menerima peningkatan anggaran sebesar 20,74% yang mana fokus UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan adalah perbaikan infrastruktur pelabuhan, dan peningkatan pelayanan kepelabuhan.

Sedangkan alokasi anggaran perubahan secara menyeluruh akan dijabarkan pada tabel di bawah ini.



## 2.1. Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>27.663.055.516</b>	<b>32.059.755.516</b>	<b>4.396.700.000</b>	<b>15,89%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.272.932.751</b>	<b>15.647.919.051</b>	<b>374.986.300</b>	<b>2,46%</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.932.180</b>	<b>19.612.872</b>	<b>-17.319.308</b>	<b>-46,89%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.932.180	19.612.872	-17.319.308	-46,89%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.872.115.870	12.897.244.828	25.128.958	0,20%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.660.855.870	12.660.924.828	68.958	0,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	211.260.000	236.320.000	25.060.000	11,86%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48.000.000</b>	<b>73.500.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>53,13%</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000	73.500.000	25.500.000	53,13%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>703.827.289</b>	<b>1.007.268.689</b>	<b>303.441.400</b>	<b>43,11%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	20.000.000	20.000.000	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.488.078	5.488.078	-	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.267.411	142.158.811	-19.108.600	-11,85%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.021.800	231.971.800	195.950.000	543,98%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.050.000	607.650.000	106.600.000	21,28%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.224.618.912</b>	<b>1.251.858.912</b>	<b>27.240.000</b>	<b>2,22%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.020.000	10.020.000	-	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.409.000	55.409.000	-	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.189.912	1.186.429.912	27.240.000	2,35%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>387.438.500</b>	<b>398.433.750</b>	<b>10.995.250</b>	<b>2,84%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.200.000	16.200.000	-	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.038.500	360.033.750	10.995.250	3,15%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.200.000	22.200.000	-	0,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>3.308.002.800</b>	<b>3.477.542.800</b>	<b>169.540.000</b>	<b>5,13%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>3.230.152.750</b>	<b>3.369.692.750</b>	<b>139.540.000</b>	<b>4,32%</b>
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3.107.152.750	3.107.152.750	-	0,00%
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	123.000.000	262.540.000	139.540.000	113,45%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>77.850.050</b>	<b>107.850.050</b>	<b>30.000.000</b>	<b>38,54%</b>
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	77.850.050	107.850.050	30.000.000	38,54%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.346.540.000</b>	<b>5.211.200.000</b>	<b>1.864.660.000</b>	<b>55,72%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>507.500.000</b>	<b>942.500.000</b>	<b>435.000.000</b>	<b>85,71%</b>
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	507.500.000	507.500.000	-	0,00%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-	435.000.000	435.000.000	100,00%
<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>232.500.000</b>	<b>1.611.700.000</b>	<b>1.379.200.000</b>	<b>593,20%</b>
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	232.500.000	253.500.000	21.000.000	9,03%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-	1.358.200.000	1.358.200.000	100,00%
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100.000.000	100.000.000	-	0,00%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>2.506.540.000</b>	<b>2.557.000.000</b>	<b>50.460.000</b>	<b>2,01%</b>
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1.252.730.000	1.252.730.000	-	0,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.253.810.000	1.304.270.000	50.460.000	4,02%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.044.000.000</b>	<b>2.304.000.000</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>120,69%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1.044.000.000</b>	<b>2.069.000.000</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>98,18%</b>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	944.000.000	1.394.000.000	450.000.000	47,67%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-	575.000.000	575.000.000	100,00%
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	235.000.000	235.000.000	100,00%
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	35.000.000	35.000.000	100,00%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>4.621.579.965</b>	<b>4.956.593.665</b>	<b>335.013.700</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>4.524.779.965</b>	<b>4.849.793.665</b>	<b>325.013.700</b>	<b>7,25%</b>
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	118.000.000	368.013.700	250.013.700	7,18%
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	118.000.000	173.000.000	55.000.000	211,88%
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	4.288.779.965	4.308.779.965	20.000.000	46,61%
<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi</b>	<b>96.800.000</b>	<b>106.800.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,47%</b>
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	62.800.000	62.800.000	-	10,33%
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	34.000.000	44.000.000	10.000.000	0,00%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>70.000.000</b>	<b>462.500.000</b>	<b>392.500.000</b>	<b>29,41%</b>
<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>70.000.000</b>	<b>462.500.000</b>	<b>392.500.000</b>	<b>560,71%</b>
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	70.000.000	462.500.000	392.500.000	560,71%

**Tabel 2.2 Alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

Dari Tabel 2.2. diketahui perbandingan sebelum perubahan dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Berikut analisis terkait perubahan anggaran:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

- Total kenaikan anggaran sebesar Rp. 374.986.300 (2,46%).
- Kenaikan terbesar terjadi pada *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* sebesar Rp. 303.441.400 (43,11%) dan *sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan* sebesar Rp 195.950.000 (543,98%) ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan publikasi atau dokumentasi.
- Beberapa kegiatan mengalami penurunan, misalnya *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* turun sebesar Rp17.319.308 (-46,89%). ini menunjukkan pergeseran anggaran berfokus ke implementasi lapangan dibandingkan perencanaan.



## **2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.**

- Kenaikan total Rp. 169.540.000 (5,13%).
- Fokus peningkatan diarahkan ke *Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir* (113,45%) dan *Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (38,54%). Hal ini dikarenakan adanya prioritas mitigasi risiko wilayah pesisir.

## **3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.**

- Peningkatan signifikan sebesar Rp1.864.660.000 (55,72%).
- *Kegiatan Penangkapan Ikan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* menunjukkan kenaikan drastis sebesar Rp. 1.379.200.000 (593,20%).
- Adanya penambahan 2 sub kegiatan baru yaitu *Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap di wilayah laut* (Rp. 435.000.000). dan *Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai* (Rp1.358.200.000).
- Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap di Wilayah Laut dan Perairan Umum Darat (PUD).

## **4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.**

- Kenaikan total mencapai Rp. 1.260.000.000 (120,69%).
- Peningkatan terbesar adalah pada *Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut* sebesar Rp1.025.000.000 (98,18%) dan beberapa sub kegiatan baru seperti *Prasarana Ikan Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat*



atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi (Rp 235.000.000) dan sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi (Rp 35.000.000). Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan produktivitas Perikanan Budidaya di Wilayah Laut dan Perairan Umum Darat (PUD).

#### **5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:**

- Kenaikan Rp. 335.013.700 (7,25%).
- Fokus anggaran diarahkan ke *Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap* (211,88%) dan *Sub kegiatan Pengembangan Masyarakat POKMASWAS*.

#### **6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Kenaikan signifikan sebesar Rp 392.500.000 (560,71%).
- Fokus pada *Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan skala menengah hingga besar yaitu sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*.

#### **Kesimpulan**

Perubahan anggaran yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan mencerminkan penyesuaian yang lebih fokus pada **peningkatan infrastruktur** dan **pelaksanaan program di lapangan**. **Sektor perikanan tangkap, budidaya, dan pengawasan** mendapatkan perhatian besar, ini sejalan dengan **tujuan memperkuat daya saing dan keberlanjutan sumber daya kelautan di Provinsi Kalimantan Utara**.



## 2.2. Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)</b>	<b>349.999.859</b>	<b>434.999.888</b>	<b>85.000.029</b>	<b>23,71%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>319.999.859</b>	<b>338.229.888</b>	<b>18.230.029</b>	<b>5,70%</b>
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>87.040.000</b>	<b>78.040.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-10,34%</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.040.000	78.040.000	-9.000.000	-10,34%
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>46.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-58,70%</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000	19.000.000	-27.000.000	-58,70%
<b>KEGIATAN ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>137.383.887</b>	<b>187.193.592</b>	<b>49.809.705</b>	<b>36,26%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.680.000	48.480.000	11.800.000	32,17%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.495.322	4.495.322	-	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.700.669	11.700.669	-	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.507.896	3.517.601	9.705	0,28%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.000.000	119.000.000	38.000.000	46,91%
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>44.825.972</b>	<b>45.816.296</b>	<b>990.324</b>	<b>2,21%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	1.500.000	600.000	66,67%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.185.500	13.185.500	-	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.740.472	31.130.796	390.324	1,27%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.750.000</b>	<b>8.180.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>72,21%</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	8.180.000	3.430.000	72,21%
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>94.770.000</b>	<b>64.770.000</b>	<b>215,90%</b>
<b>KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR</b>	<b>30.000.000</b>	<b>94.770.000</b>	<b>64.770.000</b>	<b>215,90%</b>
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	30.000.000	94.770.000	64.770.000	215,90%

**Tabel 2.3 Alokasi anggaran UPTD PMHP Tahun 2024**

Dari Tabel 2.3. diketahui perbandingan sebelum perubahan dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024 pada UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Berikut Analisis terkait perubahan anggaran:

### 1. Fokus pada Prioritas Program

#### a. Peningkatan Anggaran untuk Sektor Perikanan

- UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP): Bertambah Rp 83.000.029 (+23,71%).
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan: Bertambah Rp 64.770.000 (+215,90%).



- Kenaikan anggaran ini karena UPTD. PMHP berfokus untuk sosialisasi GMP SSOP di Kabupaten Nunukan, pembinaan UPI (Unit Pengolahan Ikan), Monitoring keamanan pangan pasar, dan Pembinaan pelaku usaha produk perikanan. Fokus ini menunjukkan komitmen untuk mendukung daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun internasional.

## **2. Efisiensi dan Penyesuaian Anggaran di Bidang Administrasi**

### a. Penurunan Anggaran Kegiatan Administrasi

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Berkurang Rp 9.000.000 (-10,34%).
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai: Berkurang Rp 27.000.000 (-58,70%).
- Penurunan besar pada pelatihan pegawai ini dikarenakan anggaran tersebut dialihkan ke prioritas lain yang lebih mendesak.

### b. Peningkatan Anggaran Administrasi Umum

- Administrasi Umum Perangkat Daerah: Bertambah Rp 49.809.705 (+36,26%).
- Komponen signifikan:
  - Penyediaan Peralatan Kantor: Bertambah Rp 11.800.000 (+32,17%).
  - Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD: Bertambah Rp 38.000.000 (+46,91%). Peningkatan di sub kegiatan ini dikarenakan perlunya koordinasi antar-SKPD.

### c. Peningkatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Bertambah Rp 3.430.000 (+72,21%). Kenaikan signifikan menunjukkan perhatian terhadap pemeliharaan aset fisik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan peralatan mendukung kelancaran operasional.



d. Efisiensi pada Kegiatan dengan Dampak Minimal

- Jasa Komunikasi dan Sumber Daya: Tidak ada perubahan anggaran, tetap Rp13.185.500.
- Penyediaan Barang Logistik Kantor dan Cetakan: Perubahan sangat kecil. Ini menunjukkan upaya untuk meminimalkan pengeluaran di sektor yang tidak secara langsung berdampak signifikan, sehingga anggaran bisa dialokasikan ke sektor prioritas.

### **Kesimpulan**

- 1) **Arah Prioritas:** Anggaran UPTD. PMHP berfokus pada pengembangan sektor perikanan, khususnya dalam peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan.
- 2) **Efisiensi Administrasi:** Penyesuaian anggaran administratif dilakukan untuk memberikan ruang bagi prioritas strategis.
- 3) **Pemeliharaan Aset:** Ada perhatian besar terhadap pemeliharaan aset, yang merupakan langkah bijak untuk menjaga efisiensi jangka panjang.



### 2.3. Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>UPTD. PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU (PBLP)</b>	<b>399.999.388</b>	<b>483.749.878</b>	<b>83.750.490</b>	<b>20,94%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>295.419.388</b>	<b>365.689.878</b>	<b>70.270.490</b>	<b>23,79%</b>
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>40.380.000</b>	<b>83.160.000</b>	<b>42.780.000</b>	<b>105,94%</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.380.000	83.160.000	42.780.000	105,94%
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>160.248.358</b>	<b>190.798.197</b>	<b>30.549.839</b>	<b>19,06%</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.121.319	2.144.952	23.633	1,11%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.533.406	42.217.314	6.683.908	18,81%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.264.000	1.045.000	-1.219.000	-53,84%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.329.633	2.390.931	61.298	2,63%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000	143.000.000	25.000.000	21,19%
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>90.431.030</b>	<b>88.121.681</b>	<b>-2.309.349</b>	<b>-2,55%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	1.250.000	500.000	66,67%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.086	11.410.089	-3.589.997	-23,93%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.680.944	75.461.592	780.648	1,05%
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>4.360.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-17,20%</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.360.000	3.610.000	-750.000	-17,20%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>104.580.000</b>	<b>118.060.000</b>	<b>13.480.000</b>	<b>12,89%</b>
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT</b>	<b>24.580.000</b>	<b>38.060.000</b>	<b>13.480.000</b>	<b>54,84%</b>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	24.580.000	38.060.000	13.480.000	54,84%
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	80.000.000	-	0,00%

**Tabel 2.4 Alokasi anggaran UPTD PBLP Tahun 2024**

Dari Tabel 2.4. diketahui perbandingan sebelum perubahan dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024 pada UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau. Berikut Analisis terkait perubahan anggaran:

### 1. Fokus pada Prioritas Program

- Anggaran pada UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau (PBLP) bertambah Rp 83.750.490 (+20,94%). Peningkatan signifikan pada anggaran menunjukkan komitmen UPTD. PBLP untuk memperkuat sektor budidaya laut dan payau. Hal ini dapat mencakup peningkatan dalam prasarana kebun bibit rumput laut, dan pendampingan perbenihan benur udang windu untuk meningkatkan produktivitas produksi perikanan budidaya.



- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Bertambah Rp13.480.000 (+12,89%). Fokus utama adalah pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, yang mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp13.480.000 (+54,84%). Ini mengindikasikan UPTD PBLP berfokus terhadap pengelolaan budidaya laut sebagai sektor strategis dengan potensi besar untuk menghasilkan nilai ekonomi.
- Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya Perairan Darat tidak ada perubahan anggaran, tetap Rp 80.000.000. Meski tidak ada perubahan, stabilitas anggaran ini mencerminkan upaya untuk tetap mempertahankan program pengelolaan perairan darat yang dianggap telah optimal.

## **2. Peningkatan Anggaran pada Administrasi**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bertambah Rp 42.780.000 (+105,94%). Kenaikan anggaran yang signifikan dikarenakan untuk memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Bertambah Rp30.549.839 (+19,06%). Fokus peningkatan anggaran diarahkan pada: Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD: Bertambah Rp25.000.000 (+21,19%), menunjukkan kebutuhan koordinasi yang lebih intensif. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Bertambah Rp6.683.908 (+18,81%), mendukung operasional kantor.

## **3. Penurunan Anggaran pada Beberapa Kegiatan**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Berkurang Rp 3.589.997 (-23,93%). Penurunan ini karena efisiensi penggunaan sumber daya.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berkurang Rp 750.000 (-17,20%). Penurunan ini menunjukkan penghematan dalam pemeliharaan.



- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** Berkurang **Rp 1.219.000** (-53,84%). Upaya untuk mengurangi pengeluaran operasional yang dianggap tidak terlalu mendesak.

#### **4. Stabilitas pada Beberapa Program**

- **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat** Tidak mengalami perubahan anggaran.

#### **Kesimpulan**

- Arah Kebijakan:** Fokus besar pada sektor perikanan budidaya (laut dan payau) menunjukkan komitmen untuk mendukung ketahanan pangan dengan upaya penyediaan bibit rumput laut dan benih ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan sehingga dapat mengurangi beban biaya produksi pembudidaya.
- Efisiensi Anggaran:** Pengurangan anggaran di sektor administrasi dan pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke sektor prioritas.



#### 2.4. Penjabaran Alokasi Anggaran Perubahan UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>2.777.012.200</b>	<b>477.012.200</b>	<b>20,74%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.273.000.000</b>	<b>2.666.307.546</b>	<b>393.307.546</b>	<b>17,30%</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>147.040.000</b>	<b>167.280.000</b>	<b>20.240.000</b>	<b>13,76%</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.040.000	167.280.000	20.240.000	13,76%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>160,00%</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	26.000.000	16.000.000	160,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>243.818.852</b>	<b>502.368.852</b>	<b>258.550.000</b>	<b>106,04%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.560.000	3.560.000	-	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.826.982	98.651.982	57.825.000	141,63%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	21.000.000	4.000.000	23,53%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.783.600	26.333.600	-11.450.000	-30,30%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.248.270	24.023.270	775.000	3,33%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.800.000	-600.000	-25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.000.000	327.000.000	208.000.000	174,79%
<b>Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Dinas Jabatan	320.000.000	320.000.000	-	0,00%



URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.470.631.148</b>	<b>1.511.728.694</b>	<b>41.097.546</b>	<b>2,79%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	7.500.000	3.000.000	66,67%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.149.620	205.652.872	22.503.252	12,29%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.282.981.528	1.298.575.822	15.594.294	1,22%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91.510.000</b>	<b>164.930.000</b>	<b>73.420.000</b>	<b>80,23%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.700.000	10.400.000	700.000	7,22%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	6.000.000	6.000.000	-	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.310.000	48.030.000	17.720.000	58,46%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunana Lainnya	20.000.000	75.000.000	55.000.000	275,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunana Lainnya	25.500.000	25.500.000	-	0,00%
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>17.000.000</b>	<b>84.704.654</b>	<b>67.704.654</b>	<b>398,26%</b>
Penyediaan Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan	17.000.000	20.000.000	3.000.000	17,65%
Pelaksana Fungsi Pemerintahan dan Pengusaha Pelabuhan Perikanan	-	64.704.654	64.704.654	100,00%

**Tabel 2.5 Alokasi anggaran UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tahun 2024**

Dari Tabel 2.5. diketahui perbandingan sebelum perubahan dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024 pada UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan. Berikut Analisis terkait perubahan anggaran:



- UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II mengalami Kenaikan Rp 477.012.200 (+20,74%). Alokasi tambahan ini dikarenakan adanya fokus pada pengembangan infrastruktur atau peningkatan kapasitas operasional pelabuhan yang penting untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami Kenaikan Rp. 258.550.000 (+106,04%). Fokus besar pada:
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Kenaikan Rp 208.000.000 (+174,79%) menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar unit.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kenaikan Rp 57.825.000 (+141,63%) untuk mendukung kelengkapan operasional.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mengalami Kenaikan Rp 67.704.654 (+398,26%). Lonjakan tajam menunjukkan dorongan signifikan terhadap pengelolaan perikanan tangkap, termasuk alokasi Rp 64.704.654 untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan.
- Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah mengalami kenaikan Rp 16.000.000 (+160,00%) untuk pelatihan pegawai. Menandakan investasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah mengalami kenaikan Rp 73.420.000 (+80,23%), terutama untuk: Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bertambah Rp 55.000.000 (+275,00%), dikarenakan adanya kebutuhan perbaikan infrastruktur fisik.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Mengalami Penuruna Rp. 11.450.000 (-30,30%). Sebagai bentuk efisiensi anggaran.



- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mengalami penurunan sebesar Rp. 600.000 (-25%) sebagai bentuk efisiensi anggaran dan digitalisasi dalam akses informasi.

### **Kesimpulan**

1. UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II berfokus pada pengembangan infrastruktur perikanan, pengelolaan pelabuhan dan peningkatan kualitas administrasi.
2. Lonjakan anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mencerminkan perhatian UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya kelautan.
3. Kenaikan anggaran pada pelatihan pegawai dan administrasi kepegawaian menunjukkan dukungan UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II terhadap pengembangan SDM untuk mendukung profesionalisme dan efisiensi birokrasi.



## **BAB III**

### **CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

Capaian kinerja adalah hasil aktual dari pelaksanaan program atau kegiatan, diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang disepakati antara Kepala Dinas dengan Gubernur yang berisi janji tentang target kinerja yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Perjanjian kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbasis waktu (SMART).

Evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan sebagai bentuk proses untuk membandingkan capaian aktual terhadap target kinerja. Jika capaian sesuai atau melebihi target, maka program dianggap berhasil. Namun jika capaian dibawah target, maka diperlukan analisis untuk mengidentifikasi kendala dan menyusun rencana perbaikan.

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi capaian kinerja ini adalah untuk memastikan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Strategis dari Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut tabel capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas periode Tahun Anggaran 2024.



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (TON)	683.230	449.796,89*	65,83%	<p>Data realisasi merupakan data sementara. Karena masih dalam proses pengumpulan dan validasi data terpadu secara nasional. Berdasarkan data sementara yang telah terinput, <b>Total Produksi Perikanan tangkap mencapai 16.789,89 Ton</b>. Yang mana sebagian besar berasal dari Kab. Bulungan dengan total 8.961,34 Ton (53,45%) lalu penyumbang kedua dari Kota Tarakan sebesar 4.444,59 Ton (26,5%) diikuti Kab. Nunukan 2.275,84 Ton, KTT 1.002,42 Ton (6%) dan Kab. Malinau 85,70 Ton (0,5%). Adapun penghambat menurunnya produksi perikanan tangkap diantaranya ketersediaan stok BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kab. Nunukan, masih adanya penggunaan alat tangkap yang rusak, serta perubahan iklim (fenomena La Niña) yang menyebabkan peningkatan curah hujan sehingga mengubah salinitas dan perubahan suhu permukaan laut sehingga mempengaruhi ekosistem laut dan ketersediaan ikan.</p> <p><b>Total Produksi Perikanan Budidaya mencapai 433.027 Ton</b>. Komoditas unggulan adalah rumput laut <i>Eucheuma cottonii</i>, dengan produksi sebesar 421.616 ton (97,36% dari total produksi perikanan budidaya). Kabupaten Nunukan menjadi kontributor utama (66,34%), diikuti oleh Kota Tarakan (31,13%). Berlimpahnya hasil produksi Rumput laut ini diikuti dengan resiko terjadinya penurunan harga pasar dan masalah lingkungan seperti konflik lahan budidaya rumput laut yang tidak sesuai zona. Keterbatasan diversifikasi produk budidaya ikan air tawar seperti nila, lele dan patin membuat pembudidaya ikan air tawar merugi karena tidak dapat menjual hasil produksi ikan air tawarnya, serta penurunan harga jual komoditas udang.</p>	<p>Adapun solusi yang menjadi rekomendasi strategis peningkatan produksi perikanan kedepannya ialah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan dengan Perangkat Daerah lainnya terkait penyaluran BBM subsidi untuk Nelayan di Kab. Nunukan</li> <li>2. Terapkan teknologi ramah lingkungan untuk penangkapan ikan.</li> <li>3. Memfasilitasi nelayan dengan Fish Finder untuk memantau lokasi ikan dan mengukur suhu air.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas pelabuhan perikanan di Tarakan dan Nunukan untuk mendukung distribusi.</li> <li>5. Membangun fasilitas penyimpanan dingin (<i>Cold Storage</i>) di wilayah produksi perikanan tinggi.</li> <li>6. Melibatkan nelayan lokal dalam program pengelolaan perikanan berbasis keberlanjutan.</li> <li>7. Pengembangan infrastruktur dengan Digitalisasi sistem monitoring dengan menggunakan teknologi <i>drone</i> dan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memantau aktivitas penangkapan ikan secara <i>real time</i>.</li> <li>8. Rumput laut memiliki pasar ekspor yang besar optimalisasi proses pasca panen dan perluasan pasar dapat meningkatkan nilai tambah.</li> <li>9. Mengembangkan komoditas ikan air tawar seperti nila, lele, patin di wilayah dengan potensi perairan darat seperti malinau, nunukan dan tana tidung</li> <li>10. Meningkatkan budidaya bandeng di Tarakan dan Nunukan yang memiliki akses perairan pantai luas.</li> <li>11. Membangun fasilitas pengolahan pasca panen.</li> <li>12. Memastikan keberlanjutan budidaya melalui pengelolaan ramah lingkungan seperti penggunaan bibit berkualitas dan pakan alami.</li> <li>13. Menerapkan zonasi budidaya untuk mengurangi konflik pemanfaatan lahan di wilayah pesisir.</li> <li>14. Mengadakan pelatihan bagi pembudidaya tentang manajemen dan pengelolaan risiko terutama pada sektor udang dan rumput laut.</li> <li>15. Mendorong keterlibatan koperasi dan kelompok nelayan dalam program pengembangan perikanan.</li> </ol>
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	78,08	68,68*	89,79%	<p>Data realisasi merupakan data sementara. Namun pada tahun 2024 terjadi perubahan metode perhitungan konsumsi ikan, metode perhitungan AKI sebelumnya adalah penjumlahan dari konsumsi ikan didalam rumah tangga (A), konsumsi ikan diluar rumah tangga (B) dan konsumsi ikan tidak tercatat (C). diubah menjadi jumlah konsumsi ikan didalam rumah tangga (A) saja. Sehingga dapat dipastikan capaian AKI di tahun 2024 mengalami penurunan karena metode perhitungan AKI secara nasional menghilangkan 2 (dua) variabelnya.</p>	<p>Solusi untuk meningkatkan angka konsumsi ikan (AKI) ditingkat Provinsi ialah peningkatan akses pasar, penerapan dan perbaikan sistem rantai dingin dan logistik ikan, Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), serta Pembinaan kepada Pengolah dan Pemasar, serta menjaga mutu hasil perikanan.</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
3	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir Yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku (%)	46,38	45,11	97,26%	<p>Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku (%) adalah indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan berbasis zonasi (seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / RZWP-3-K). Saat ini Provinsi Kaltara telah menyusun RZWP3k dan masih dalam proses integrasi dengan RT/RW Provinsi yang akan berlanjut di tahun 2025.</li> <li>Masih ditemukannya pelanggaran perikanan seperti Destructive Fishing, Illegal Fishing dan budidaya rumput laut tidak sesuai zona.</li> <li>Masih banyaknya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki izin PKKPR (Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) di pesisir.</li> </ol>	<p>Solusi untuk peningkatan persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan percepatan proses integrasi RZWP3K ke dalam RT/RW Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dengan melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara periodik dan terpadu.</li> <li>Melibatkan masyarakat lokal di daerah pesisir untuk menjaga dan mengelola wilayah pesisir.</li> <li>Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat lokal untuk penyusunan dokumen PKKPR (Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).</li> </ol>
		Persentase Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola (%)	88,07	81,10	99,09%	<p>Persentase Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (%) adalah indikator yang mengukur tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif sesuai dengan standar pengelolaan konservasi yang berlaku. Provinsi Kaltara memiliki potensi kawasan konservasi seluas 32.844,23 Ha, namun kawasan konservasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 27 Tahun 2022 adalah Kawasan konservasi (KK) perairan binusan dan pulau sinelak di kab. Nunukan dengan luas 900,11 Ha. Selain itu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 menetapkan KK Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan seluas 24.581,97 Ha. Dan pengusulan pencadangan KK pulau Cermin Kab Bulungan seluas 1.156,16 Ha. Masih ada 2 kawasan konservasi bebatu dan kawasan konservasi tana lia dengan total luas KK seluas 6.205,99 Ha belum dilakukan pengusulan pencadangan.</p> <p>Selain itu efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu diukur dalam indikator ini, dari rencana pengelolaan, pengawasan dan penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga dan mengelola KK menjadi tolak ukur.</p>	<p>Solusi untuk peningkatan persentase kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir yang dikelola ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>percepatan pengusulan pencadangan Kawasan konservasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>Adanya tenaga ahli, pelatihan masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan KK.</li> <li>KK Binusan sinelai dan KK Tanjung Palas timur telah memiliki infrastruktur seperti pos Jaga/pengawasan, kapal patroli dan alat pemantauan yang telah diadakan di Tahun Anggaran 2024. Maka kawasan konservasi perlu memiliki pendanaan yang cukup untuk operasional dan kegiatan pelestarian.</li> <li>Memiliki program pelestarian seperti rehabilitasi terumbu karang, mangrove dll. Serta didukung dengan dokumen resmi pengelolaan seperti rencana zonasi dan rencana tata kelola KK.</li> <li>Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti memberikan data yang transparan kepada masyarakat, nelayan dan organisasi internasional mengenai pengelolaan kawasan konservasi.</li> </ol>

Keterangan : Data sementara (\*)

**Tabel 3.1 Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas periode Tahun Anggaran 2024.**



### 3.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Pelaksanaan Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>15.647.919.051</b>	<b>97,93</b>	<b>15.324.002.121</b>	<b>Tidak ada Masalah</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	19.612.872	99,42	19.500.000	Tidak Ada masalah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100	19.612.872	99,42	19.500.000	Tidak Ada masalah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	12.897.244.828	98,34	12.682.619.732	Tidak Ada masalah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	12.660.924.828	98,34	12.450.305.732	Tidak Ada masalah		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			98,56	236.320.000	98,30	232.314.000	Efisiensi Anggaran		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	73.500.000	96,02	70.572.347	Tidak Ada masalah		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100	73.500.000	96,02	70.572.347	Tidak Ada masalah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.007.268.689	95,48	961.730.434	Tidak Ada masalah		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	20.000.000	98,75	19.750.000	Tidak Ada masalah		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100	5.488.078	90,49	4.965.900	Tidak Ada masalah		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			98,21	142.158.811	88,83	126.285.813	Adanya Efisiensi pengadaan logistik makan minum		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100	231.971.800	88,87	206.160.400	Tidak Ada masalah		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	607.650.000	99,49	604.568.321	Tidak Ada masalah		



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.251.858.912	96,01	1.201.894.315	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	10.020.000	100,00	10.020.000	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	55.409.000	98,79	53.755.454	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	1.186.429.912	95,93	1.138.118.861	Tidak ada masalah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	398.433.750	97,30	387.685.293	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,54	16.200.000	73,96	11.981.600	Adanya Efisiensi Anggaran	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	360.033.750	98,47	354.523.693	Tidak ada masalah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	22.200.000	95,41	21.180.000	Tidak ada masalah	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>100</b>	<b>3.477.542.800</b>	<b>96,44</b>	<b>3.353.802.205</b>		
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100	3.369.692.750	96,33	3.246.078.407	Tidak ada masalah	
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	96,03	3.107.152.750	96,03	2.983.757.227	Terjadi kesalahan pembayaran pada rekening belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya, sehingga terutang sebesar Rp. 56.250.000,-	Sisa pembayaran di anggaran di Tahun anggaran 2025
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	262.540.000	99,92	262.321.180	Tidak ada masalah	
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	107.850.050	99,88	107.723.798	Tidak ada masalah	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	107.850.050	99,88	107.723.798	Tidak ada masalah	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>100</b>	<b>5.211.200.000</b>	<b>97,40</b>	<b>5.075.464.487</b>	Tidak ada masalah	
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	100	942.500.000	92,44	871.228.469	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	100	507.500.000	98,96	502.240.069	Tidak ada masalah	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	100	435.000.000	84,82	368.988.400	Tidak ada masalah	
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100	1.611.700.000	98,05	1.580.337.125	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	100	253.500.000	99,27	251.641.475	Tidak ada masalah	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	100	1.358.200.000	97,83	1.328.695.650	Tidak ada masalah	
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	100.000.000	94,83	94.834.400	Tidak ada masalah	
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	98,00	100.000.000	94,83	94.834.400	Efisiensi Anggaran Makan Minum Kegiatan	
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100	2.557.000.000	98,91	2.529.064.493	Tidak ada masalah	
			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	100	1.252.730.000	99,90	1.251.523.459	Tidak ada masalah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	100	1.304.270.000	97,95	1.277.541.034	Tidak ada masalah	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>100</b>	<b>2.304.000.000</b>	<b>97,87</b>	<b>2.254.993.758</b>	Tidak ada masalah	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			100	2.304.000.000	97,87	2.254.993.758	Tidak ada masalah		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			100	1.394.000.000	96,91	1.350.918.300	Tidak ada masalah		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			100	575.000.000	99,15	570.105.103	Tidak ada masalah		
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi			100	100.000.000	100,00	99.998.000	Tidak ada masalah		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			100	35.000.000	99,37	34.779.755	Tidak ada masalah		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			100	200.000.000	99,60	199.192.600	Tidak ada masalah		
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>100</b>	<b>4.956.593.665</b>	<b>99,02</b>	<b>4.908.104.872</b>	Tidak ada masalah		
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			100	4.849.793.665	99,05	4.803.650.041	Tidak ada masalah		
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	100	368.013.700	99,82	367.359.383	Tidak ada masalah				



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	100	173.000.000	99,90	172.820.805	Tidak ada Masalah	
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			99,61	4.308.779.965	98,95	4.263.469.853	Efisiensi Anggaran pada belanja Makan Minum Rapat dan cetak spanduk		
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi			100	106.800.000	97,80	104.454.831	Tidak ada Masalah		
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			100	62.800.000	99,57	62.531.231	Tidak ada Masalah		
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			95,57	44.000.000	95,28	41.923.600	Efisiensi anggaran pada uji laboratorium		
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>100</b>	<b>462.500.000</b>	<b>99,26</b>	<b>459.087.091</b>	Tidak ada masalah		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			99,26	462.500.000	99,26	459.087.091	Efisiensi anggaran pada belanja cetak spanduk		
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			99,26	462.500.000	99,26	459.087.091	Efisiensi anggaran pada belanja cetak spanduk		
		<b>TOTAL</b>	<b>99,21%</b>	<b>32.059.755.516</b>	<b>97,87%</b>	<b>31.375.454.534</b>			

Tabel 3.2 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran DKP Tahun 2024



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
2	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>100%</b>	<b>338.229.888</b>	<b>100%</b>	<b>324.869.311</b>	<b>Tidak Ada Masalah</b>	
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100%	78.040.000	98%	76.680.000	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	78.040.000	98%	76.680.000	Tidak Ada Masalah	
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100%	19.000.000	86%	16.248.406	Tidak Ada Masalah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	19.000.000	86%	16.248.406	Tidak Ada Masalah	
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	187.193.592	89%	182.383.086	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	48.480.000	99%	47.918.000	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	4.495.322	74%	3.324.300	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	11.700.669	80%	9.307.700	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	3.517.601	91%	3.207.254	Tidak Ada Masalah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	119.000.000	100%	118.625.832	Tidak Ada Masalah	
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	45.816.296	90%	42.282.819	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1.500.000	97%	1.460.000	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	13.185.500	74%	9.692.023	Tidak Ada Masalah	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
2	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	31.130.796	100%	31.130.796	Tidak Ada Masalah	
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	8.180.000	89%	7.275.000	Tidak Ada Masalah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	8.180.000	89%	7.275.000	Tidak Ada Masalah	
			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	100%	<b>94.770.000</b>	100%	<b>93.221.400</b>	Tidak Ada Masalah	
			PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR	100%	94.770.000	98%	93.221.400	Tidak Ada Masalah	
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	100%	94.770.000	98%	93.221.400	Tidak Ada Masalah	
			<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>432.999.888</b>	<b>96,56%</b>	<b>418.090.711</b>		

Tabel 3.3 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran UPTD. PMHP Tahun 2024



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
3	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau (PBLP)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>100,00%</b>	<b>365.689.878</b>	<b>95,81%</b>	<b>350.361.748</b>	<b>Tidak Ada Masalah</b>	
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100,00%	83.160.000	95,91%	79.760.000	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00%	83.160.000	95,91%	79.760.000	Tidak Ada Masalah	
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100,00%	190.798.197	94,76%	180.795.337	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	42.217.314	89,90%	37.952.670	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	2.144.952	92,69%	1.988.140	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,98%	1.045.000	61,24%	640.000	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	2.390.931	45,93%	1.098.100	Tidak Ada Masalah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	143.000.000	97,28%	139.116.427	Tidak Ada Masalah	
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,00%	88.121.681	99,48%	87.666.411	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	1.250.000	97,35%	1.216.900	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	11.410.089	96,30%	10.987.919	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	75.461.592	100,00%	75.461.592	Tidak Ada Masalah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	3.610.000	59,28%	2.140.000	Tidak Ada Masalah	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
3	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau (PBLP)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	3.610.000	59,28%	2.140.000	Tidak Ada Masalah	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>88,20%</b>	<b>118.060.000</b>	<b>77,80%</b>	<b>91.854.500</b>	<b>Tidak Ada Masalah</b>	
			PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	76,39%	38.060.000	46,51%	17.701.000	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	76,39%	38.060.000	46,51%	17.701.000	Tidak Ada Masalah	
			PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	100,00%	80.000.000	92,69%	74.153.500	Tidak Ada Masalah	
			"Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah	100,00%	80.000.000	92,69%	74.153.500	Tidak Ada Masalah	
			<b>TOTAL</b>	<b>94,10%</b>	<b>Rp483.749.878</b>	<b>91,41%</b>	<b>Rp442.216.248</b>		

**Tabel 3.4 Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran UPTD. PBLP Tahun 2024**



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
3	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Pelabuhan Perikanan Tenggayu II	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>99,80</b>	<b>2.692.307.546</b>	<b>96,97%</b>	<b>2.610.811.120,00</b>	<b>Tidak ada Masalah</b>	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,61	167.280.000	98,33%	164.490.000,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,61	167.280.000	98,33%	164.490.000,00	terlambatnya informasi terkait honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dari biro pengadaan barang dan jasa	menggali informasi lebih lanjut mengenai peraturan honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	26.000.000	58,62%	15.242.254,00	Tidak Ada Masalah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,00	26.000.000	58,62%	15.242.254,00	Tidak adanya kegiatan bimbingan teknis dari instansi yang di inginkan	Akan mencari referensi bimbingan teknis dari berbagai sumber
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,93	502.368.852	98,02%	492.400.234,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	3.560.000	92,99%	3.310.500,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	98.651.982	95,08%	93.801.700,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	21.000.000	93,86%	19.710.000,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	26.333.600	95,57%	25.167.900,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	24.023.270	96,70%	23.231.400,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	1.800.000	100,00%	1.800.000,00	Tidak Ada Masalah	-



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
3	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Pelabuhan Perikanan Tenggayu II	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,50	327.000.000	99,50%	325.378.734,00	Tidak Ada Masalah	-
			Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	320.000.000	96,00%	307.200.000,00	Tidak Ada Masalah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Dinas Jabatan	100,00	320.000.000	96,00%	307.200.000,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,33	1.511.728.694	97,13%	1.468.281.451,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	7.500.000	100,00%	7.500.000,00	Tidak Ada Masalah	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	205.652.872	97,16%	199.806.341,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97,99	1.298.575.822	97,10%	1.260.975.110,00	Tidak Ada Masalah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,95	164.930.000	98,95%	163.197.181,00	Tidak Ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	10.400.000	91,00%	9.464.500,00	Tidak Ada Masalah	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	99,93	6.000.000	92,43%	5.545.900,00	Tidak Ada Masalah	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	48.030.000	99,40%	47.741.281,00	Tidak Ada Masalah	-		



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
3	Kelautan dan Perikanan	UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkyau II	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,98	75.000.000	99,98%	74.983.500,00	Tidak Ada Masalah	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,85	25.500.000	99,85%	25.462.000,00	Tidak Ada Masalah	-
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	98,16	84.704.654	91,87%	77.816.000,00	Tidak Ada Masalah	-
			Penyediaan Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan	100,00	20.000.000	99,96%	19.991.000,00	Tidak Ada Masalah	-
			Pelaksana Fungsi Pemerintahan dan Pengusaha Pelabuhan Perikanan	96,31	64.704.654	89,37%	57.825.000,00	Efisiensi Anggaran	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,98	75.000.000	99,98%	74.983.500,00	Tidak Ada Masalah	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,85	25.500.000	99,85%	25.462.000,00	Tidak Ada Masalah	-
			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>98,16</b>	<b>84.704.654</b>	<b>91,87%</b>	<b>77.816.000,00</b>	Tidak Ada Masalah	-
			Penyediaan Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan	100,00	20.000.000	99,96%	19.991.000,00	Tidak Ada Masalah	-
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusaha Pelabuhan Perikanan	96,31	64.704.654	89,37%	57.825.000,00	Efisiensi Anggaran	-
		<b>TOTAL</b>	<b>97,49</b>	<b>2.777.012.200</b>	<b>96,82%</b>	<b>2.688.627.120,00</b>		-	

**Tabel 3.5** Capaian kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran UPTD. PP Tengkyau II Tahun 2024



### **3.3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah program selaras dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kinerja.

Manfaat dari analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini bermanfaat untuk mengukur:

1. Efisiensi dan Efektivitas

Memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam program memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target

2. Akuntabilitas Kinerja

Membuktikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

3. Perbaikan Strategi

Mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan program dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Berikut Tabel Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja.



No	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang dilakukan	Relevansi Kegiatan terhadap Target	Hambatan yang dihadapi	Rekomendasi
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (TON)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Tambatan Perahu</li> <li>2. Bantuan Alat Tangkap</li> <li>3. Mesin Tempel 15 PK</li> <li>4. Sosialisasi perizinan usaha perikanan tangkap</li> <li>5. Penyusunan Dokumen AMDAL rencana pembangunan PP Mansapa Nunukan</li> <li>6. Sosialisasi kesyahbandaran pelaksanaan tata kelola pengawakan kapal perikanan dan pelaksanaan perjanjian kinerja laut bagi awak kapal perikanan</li> <li>7. Sosialisasi kesyahbandaran (Bimtek sertifikasi kecapakapan nelayan (SKN))</li> <li>8. Pembangunan Lantai jemur Rumput Laut</li> <li>9. Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut</li> <li>10. Pelatihan Pembuatan Probiotik Bagi Pembudidaya tambak tradisional Udang windu di Provinsi Kaltara.</li> <li>11. Bantuan Bibit Ikan Bandeng</li> <li>12. Bantuan Bibit udang Windu</li> <li>13. Pengawasan perikanan tangkap dan budidaya di wilayah laut</li> <li>14. Pengawasan perikanan tangkap budidaya di wilayah PUD (Perairan Umum Darat)</li> </ol>	<p>Sebagian besar kegiatan relevan karena mendukung peningkatan produksi melalui fasilitas dan pelatihan. Namun, ada kegiatan seperti "Penyusunan Dokumen AMDAL" yang relevansinya tidak langsung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengawasan rutin.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam budidaya ikan dan tambak.</li> <li>3. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa lokasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatkan anggaran untuk pengawasan perikanan tangkap dan budidaya.</li> <li>2. Lakukan edukasi dan pendampingan kepada pembudidaya.</li> <li>3. Selesaikan dokumem AMDAL dengan mempercepat koordinasi lintas sektor.</li> </ol>



No	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang dilakukan	Relevansi Kegiatan terhadap Target	Hambatan yang dihadapi	Rekomendasi
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Safari Gemarikan</li> <li>2. Penyusunan FS Kelayakan Pembangunan Laboratorium Mutu Hasil Perikanan</li> <li>3. Sosialisasi GMOP SSOP di Nunuukan</li> <li>4. Monitoring keamanan pangan pasar</li> <li>5. Pembinaan Pelaku Usaha Produk perikanan</li> <li>6. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan( UPI)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Safari Gemarikan relevan secara langsung karena meningkatkan kesadaran konsumsi ikan.</li> <li>2. FS kelayakan laboratorium relevansinya tidak langsung, lebih mendukung jangka panjang.</li> <li>3. Sosialisasi GMOP SSOP, relevansi moderat dampaknya terhadap konsumsi ikan secara nasional mungkin terbatas jika tidak diperluas.</li> <li>4. Monitoring keamanan pangan pasar relevansi tidak langsung meskipun pengaruhnya pada angka konsumsi ikan lebih ke jangka panjang.</li> <li>5. Pembinaan Pelaku Usaha UPI relebansi Moderat mendukung target secara tidak langsung melalui penyediaan produk yang berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sosialisasi yang merata di seluruh wilayah.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan laboratorium.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatkan intensitas Safari Gemarikan di daerah terpencil.</li> <li>2. Cari sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan laboratorium.</li> </ol>



No	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang dilakukan	Relevansi Kegiatan terhadap Target	Hambatan yang dihadapi	Rekomendasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku (%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi materi teknis perairan pesisir RZWP3K Provinsi Kaltara di Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan.</li> <li>2. Sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir dengan lokus Kota Tarakan.</li> <li>3. Sosialisasi penguatan kelembagaan penggerak konservasi di Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan.</li> </ol>	Semua kegiatan relevan karena mendukung tata kelola wilayah laut sesuai aturan dan penguatan kelembagaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan wilayah laut.</li> <li>2. Terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang tata kelola wilayah laut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya tata kelola wilayah laut.</li> <li>2. Tambahkan pelatihan bagi tenaga ahli untuk mendukung implementasi RZWP3K.</li> </ol>



No	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang dilakukan	Relevansi Kegiatan terhadap Target	Hambatan yang dihadapi	Rekomendasi
4	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pondok informasi di kawasan konservasi Tanjung Palas Timur.</li> <li>2. Pembangunan gapura kawasan konservasi di KK Sinelak dan Binusan, Nunukan.</li> <li>3. Pembangunan pos jaga di KK Sinelak dan Binusan, Nunukan.</li> <li>4. Papan larangan di kawasan konservasi.</li> <li>5. Papan nama informasi di kawasan konservasi.</li> <li>6. Penataan batas kawasan konservasi.</li> <li>7. Sarana perkantoran di pos jaga dan pondok informasi KK.</li> <li>8. Pengadaan <i>speedboat</i> konservasi.</li> </ol>	Semua kegiatan relevan karena mendukung pengelolaan kawasan konservasi secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya anggaran operasional untuk pengelolaan dan pengawasan konservasi.</li> <li>2. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas yang telah dibangun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan, bukan hanya pembangunan fisik.</li> <li>2. Tingkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitas konservasi.</li> </ol>

**Tabel 3.6. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**



### 3.4. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang Kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam pada tabel berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan didaerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi tercapainya kemakmuran masyarakat.</li> <li>2. Melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan kelautan dan perikanan bagi masyarakat daerah.</li> <li>3. Melindungi keberlangsungan sumber daya kelautan perikanan dan ekosistem laut.</li> <li>4. Mencegah dan mengendalikan kegiatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak merusak lingkungan dan ekosistem perairan sekitarnya.</li> <li>5. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat.</li> <li>6. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan umum.</li> </ol>
2.	Penataan Kegiatan budidaya rumput laut, pemukat rumput laut dan pasca panen rumput laut	Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Rumput Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektivitas penataan kegiatan budidaya rumput laut, pemukat rumput laut dan pasca panen rumput laut di daerah.</li> <li>2. Melakukan penataan sebagai upaya keteraturan dalam kegiatan pembudidayaan rumput laut yang dapat membahayakan pengguna jasa perairan.</li> <li>3. Melakukan pengendalian konflik antar pembudidaya dan pemukat rumput laut.</li> <li>4. Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing rumput laut.</li> </ol>

**Tabel 3.7 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2024**



### 3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT /JAWABAN OPD	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
1.	<p>Masih terdapat serapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Utara yang rendah ini ditunjukkan dengan realisasi fisik dan keuangan yang masih rendah, untuk itu Pansus Merekomendasikan kepada semua OPD Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan perencanaan anggaran agar lebih matang</p>	<p>Berikut langkah-langkah strategis dalam perencanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk memastikan anggaran yang lebih matang, efektif dan tepat sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DKP telah melakukan analisis kebutuhan melalui data dan evaluasi program tahun sebelumnya (realisasi fisik dan keuangan, evaluasi RKPD)</li> <li>2. DKP telah mengidentifikasi program kegiatan prioritas yang relevan dengan tujuan, visi misi daerah dan kebutuhan masyarakat seperti Budidaya rumput laut, pembangunan infrastruktur perikanan, benih, bibit ikan, pengawasan perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan konservasi.</li> <li>3. DKP telah melakukan sinkronisasi program dengan kebijakan strategis Provinsi (RKPD) Tahun Anggaran 2024 dan RKP KKP Tahun 2024 yang tertuang didalam berita Acara Rakortekbang Tahun 2023 terhadap kesepakatan target kinerja tahun 2024.</li> <li>4. DKP telah menyusun rencana kegiatan dengan detail, meliputi tujuan, target output, indikator keberhasilan, alokasi anggaran dan timeline pelaksanaan.</li> </ol>	<p>Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan perencanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan lebih matang, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan</p>	Seluruh OPD



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT /JAWABAN OPD	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
2.	<p>Untuk OPD-OPD strategis berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan , Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), Pansus merekomendasikan kepada Gubernur untuk perkuat anggarannya Pada APBD Perubahan 2024 yang akan datang.</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan utara mendapatkan alokasi penambahan anggaran perubahan tahun 2024 sebesar Rp.4.396.700.000,- (15,89%) sehingga total anggaran perubahan Dinas Kelautan Perikanan menjadi Rp.32.059.755.516. dari sebelumnya sebesar Rp.27.663.055.516,- (anggaran murni).</p> <p>Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran perubahan tahun 2023 DKP mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 6,84% atau selisih sebesar Rp. 2.357.121.087.</p> <p>Namun hal ini tidak mengurangi eksistensi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, program kegiatan di Tahun anggaran 2024 lebih fokus pada peningkatan produksi perikanan dengan dukungan penambahan anggaran maka DKP berfokus pada program-program prioritas diantaranya program pengelolaan perikanan tangkap, Program pengelolaan perikanan budidaya dan Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>Hal ini dibuktikan dengan realisasi sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebanyak 1.160 Unit dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 25 Kelompok masyarakat perikanan. Serta pemberian 5 unit <i>speedboat</i> pengawasan kepada 5 POKMASWAS, 5 Perlengkapan POKMASWAS yang mana hal ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat perikanan, memperkuat daya saing dan keberlanjutan sumber daya kelautan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara.</p>	<p>Dengan anggaran yang diperkuat, program-program strategis di Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih efektif dilaksanakan, memberikan dampak ekonomi nyata, dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Disperindagkop</li> </ol>

**Tabel. 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**



## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah yang menerima tugas dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah tingkat atas dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian ini diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan, baik dalam hal hasil (*output*) maupun dampak (*Outcome*).

Tugas pembantuan merujuk pada pelaksanaan kegiatan tertentu berdasarkan perintah atau perjanjian dari pemerintah tingkat atas (Pusat/Provinsi) kepada daerah tingkat bawah. Capaian kinerjanya melibatkan evaluasi keberhasilan kegiatan atau program yang dikerjakan.

##### **4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya**

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dibidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara di berikan tugas pembantuan urusan kelautan dan perikanan yang terdiri dari 6 (Enam) Satuan Kerja (Satker) diantaranya adalah:



1. Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Jenderal
2. Satuan Kerja (Satker) Perikanan Budidaya
3. Satuan Kerja (Satker) Perikanan Tangkap
4. Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Satuan Kerja (Satker) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Satuan Kerja (Satker) Pengelolaan Ruang Laut

Berikut uraian identifikasi Capaian kinerja tugas pembantuan sektor Kelautan dan perikanan yang dituangkan kedalam tabel capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2024.



No	Kode	Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
				Fisik (%)	Keuangan		
					(Rp)	(%)	
<b>1</b>	<b>032.01.3.690958</b>	<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>185.293.000</b>	<b>100</b>	<b>184.435.996</b>	<b>99,54</b>	<b>857.004</b>
		Program Dukungan Manajemen	185.293.000	100	184.435.996	99,54	857.004
		Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	185.293.000	100	184.435.996	99,54	857.004
<b>2</b>	<b>032.03.3.632335</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>277.932.000</b>	<b>100</b>	<b>270.427.511</b>	<b>97,30</b>	<b>7.504.489</b>
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	277.932.000	100	270.427.511	97,30	7.504.489
		Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	15.290.000	100	15.289.471	100,00	529
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	37.690.000	100	37.684.800	99,99	5.200
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	56.250.000	100	55.790.000	99,18	460.000
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan	26.745.000	100	26.733.749	99,96	11.251
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	141.957.000	100	134.929.491	95,05	7.027.509
<b>3</b>	<b>032.04.3.691247</b>	<b>Perikanan Budidaya</b>	<b>375.452.000</b>	<b>100</b>	<b>375.004.448</b>	<b>99,88</b>	<b>447.552</b>
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	229.749.000	100	229.393.628	99,85	355.372



No	Kode	Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
				Fisik (%)	Keuangan		
					(Rp)	(%)	
		Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	229.749.000	100	229.393.628	99,85	355.372
		Program Dukungan Manajemen	145.703.000	100	145.610.820	99,94	92.180
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	145.703.000	100	145.610.820	99,94	92.180
<b>4</b>	<b>032.05.3.691003</b>	<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>173.352.000</b>	<b>100</b>	<b>172.178.598</b>	<b>99,32</b>	<b>1.173.402</b>
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	81.100.000	100	80.134.078	98,81	965.922
		Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	81.100.000	100	80.134.078	98,81	965.922
		Progran Dukungan Manajemen	92.252.000	100	92.044.520	99,78	207.480
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92.252.000	100	92.044.520	99,78	207.480
<b>5</b>	<b>032.06.3.691041</b>	<b>Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b>	<b>231.858.000</b>	<b>100</b>	<b>231.562.922</b>	<b>99,87</b>	<b>295.078</b>
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	84.445.000	100	84.399.868	99,95	45.132
		Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	47.639.000	100	47.597.868	99,91	41.132



No	Kode	Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>6</b>	<b>032.07.3.691079</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Laut</b>	<b>341.840.000</b>	<b>100</b>	<b>324.972.259</b>	<b>95,07</b>	<b>16.867.741</b>
		Program Kualitas Lingkungan hidup	341.840.000	100	324.972.259	95,07	16.867.741
		Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	180.000.000	100	163.974.859	91,10	16.025.141
		Perencanaan Ruang Laut	100.000.000	100	99.655.000	99,66	345.000
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	61.840.000	100	61.342.400	99,20	497.600
<b>TOTAL</b>			<b>1.585.727.000</b>	<b>100</b>	<b>1.558.581.734</b>	<b>98,29</b>	<b>27.145.266</b>

**Tabel 3.9. Identifikasi realisasi fisik dan keuangan tugas pembantuan Tahun 2024**



#### **4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Berdasarkan Tabel 3.9 Identifikasi realisasi fisik dan keuangan tugas pembantuan Tahun 2024 diketahui bahwa :

1. Total anggaran sebesar **Rp 1.585.727.000**, dengan realisasi mencapai **98,29%** atau **Rp 1.558.581.734**.
2. Sisa anggaran keseluruhan sebesar **Rp 27.145.266**, yang menunjukkan efisiensi yang baik dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Realisasi fisik rata-rata mencapai **100%**, menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target kegiatan di hampir semua satker.
4. Sisa anggaran terbesar pada Satker **Pengelolaan Ruang Laut** memiliki persentase sisa anggaran terbesar (Rp. 16.205.141) pada program perlindungan kawasan konservasi hal ini menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan.
5. Beberapa program manajemen memiliki sisa anggaran signifikan, seperti Dukungan Manajemen Internal Direktorat Perikanan Tangkap. Hal ini perlu dioptimalkan untuk mengurangi sisa anggaran di masa mendatang.
6. Dengan realisasi yang sudah mencapai lebih dari 98%, pelaksanaan **tugas pembantuan** ini secara umum dapat dikategorikan **berhasil**, dengan ruang perbaikan pada aspek manajemen internal dan efisiensi kegiatan konservasi.



## Dokumentasi

<b>1. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.03.1.01.0002</b>
Target	2 Unit
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	2 Unit / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 507.500.000
Realisasi Anggaran	Rp. 502.240.069 / 98,96%
Penerima Manfaat	1. Warga RT. 02 Desa Setabu, Sebatik Barat 2. Warga RT. 04 Desa Setabu, Sebatik Barat
Lokasi	Kab. Nunukan
Keterangan	Pembangunan Tambatan Perahu

### DOKUMENTASI



Foto sebelum Pembangunan Tambatan Perahu RT. 02 Desa Setabu



Foto sesudah Pembangunan Tambatan Perahu RT. 02 Desa Setabu



Foto sebelum Pembangunan Tambatan Perahu RT. 04 Desa Setabu



Foto sesudah Pembangunan Tambatan Perahu RT. 04 Desa Setabu



<b>2. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.03.1.01.0003</b>
Target	897 Unit
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	897 Unit / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 435.000.000
Realisasi Anggaran	Rp. 368.988.400 / 84,82%
Penerima Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KUB. Cahaya Tembaring</li> <li>2. KUB. Nelayan Inhutani</li> <li>3. KUB. Mitra Jaya</li> <li>4. KUB. Cahaya Tiger</li> </ol>
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Tembaring RT. 013 Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan (KUB. Cahaya Tembaring)</li> <li>2. Jl. Pasar Sentral Inhutani, RT.10 Kel. Nunukan utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan (KUB. Nelayan Inhutani)</li> <li>3. Jl. Dewi Sartika RT.08 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan (KUB Mitra Jaya)</li> <li>4. Jl. Tanjung batu RT. 022 Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan ( KUB Cahaya Tiger)</li> </ol>
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gillnet 4 Inch = 70 Unit</li> <li>2. Ambau Kepiting = 810 Unit</li> <li>3. Gillnet 4 inch = 10 Buah</li> <li>4. Jaring 1.5 inch benang 12 = 130 Unit</li> <li>5. Pelampung sosis = 2.000 Buah</li> <li>6. Tali Nomor 2,5 = 28 Pcs</li> <li>7. Tali Nomor 3 = 10 Pcs</li> <li>8. Tali Nomor 4 = 10 Pcs</li> <li>9. Tali Nomor 5 = 10 Pcs</li> <li>10. Hibah Uang Rp. 35. 000.000</li> <li>11. Mesin Tempel 15 PK = 4 Unit</li> </ol>



## DOKUMENTASI



Foto Serah Terima Barang  
Mesin Tempel 15 PK Sebanyak 4 Unit  
Pada KUB. Cahaya Tiger



Foto Serah Terima Barang Ambau  
Kepiting Sebanyak 810 Unit  
Pada KUB. Nelayan Inhutani



Foto Serah Terima Barang  
Gillnet 4 Inch Sebanyak 70 Set  
Pada KUB. Cahaya Tembaring



Foto Pembelian Barang  
Hibah Uang pada KUB Mitra Jaya



<b>3. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Lota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.03.1.02.0002</b>
Target	1 Unit
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Unit / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 253.500.000,-
Realisasi Anggaran	Rp. 241.641.475,- / 99,27%
Penerima Manfaat	KUB. Ulun Taka
Lokasi	RT.01 Kec. Desa Malinau Kota, Malinau
Keterangan	Pembangunan Tambatan Perahu

**DOKUMENTASI**





<b>4. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Lota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.03.1.02.0003</b>
Target	246 Unit
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	246 Unit / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 1.358.200.000,-
Realisasi Anggaran	Rp. 1.328.695.650,- / 97,83%
Penerima Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KUB. Udang Gala</li> <li>2. KUB. Nelayan Menampok Lubok Tarakan</li> <li>3. KUB. Galangan Sabanar</li> <li>4. KUB. Nelayan Gium Debuyag</li> <li>5. KUB nelayan Tugu Bersatu</li> <li>6. KUB Nelayan Pokot Gondrong</li> </ol>
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Tepian RT. 001. Kec. Sembakung, Kab. Nunukan (KUB. Udang Gala)</li> <li>2. Jl. Pembangunan Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan ( KUB nelayan menampok Lubok tarakan)</li> </ol>
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gillnet 4 In = 24 Set</li> <li>2. Gilnet 2 In no 0,35 = 50 Paket</li> <li>3. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Desa Tias</li> <li>4. Mesin ketinting 13 PK = 13 Unit</li> <li>5. Mesin ketinting 9 HP = 9 Unit</li> <li>6. Mesin ketinting 6 Hp 51 Unit</li> <li>7. Pukat gondrong 1.3/4 Inch = 30 Paket</li> <li>8. Coolbox 50 liter = 30 unit</li> <li>9. Mesin ketinting 8 PK = 16 Unit</li> <li>10. Mesin ketinting MZ 12 HP = 6 unit</li> <li>11. Mesin tempel 15 HP = 1 unit</li> <li>12. Perahu kayu 6 meter = 10 unit</li> <li>13. Perahu kayu 7 meter = 6 unit</li> </ol>



## DOKUMENTASI



<b>5.</b>	<b>Program Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.03.1.03.0002</b>
	Target	110 Rekomendasi
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	159 Rekomendasi / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 100.000.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 94.834.400,- / 94,83%



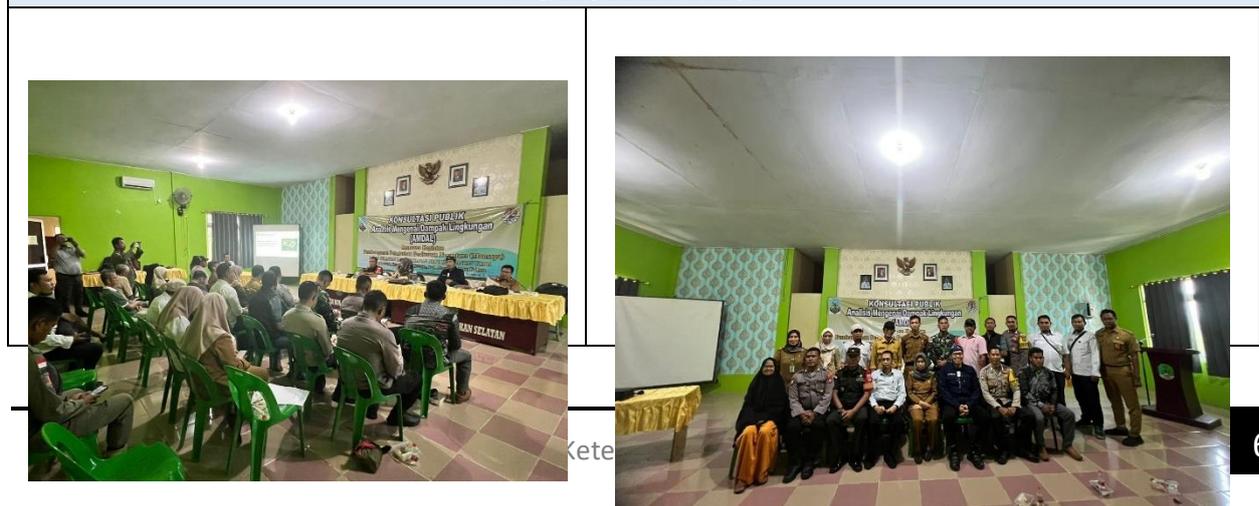
Penerima Manfaat	Pelaku usaha Perikanan Tangkap
Lokasi	Se-Kaltara
Keterangan	

**DOKUMENTASI**



<b>6. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Penetapan Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</b>
Target	1 Pelabuhan Perikanan
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Pelabuhan Perikanan / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 1.252.730.000,-
Realisasi Anggaran	Rp. 1.251.523.459,- / 99,90 %
Penerima Manfaat	Pelaku Usaha Perikanan
Lokasi	Kab. Nunukan
Keterangan	Penyusunan AMDAL Rencana Pembangunan PP Mansapa, Nunukan

**DOKUMENTASI**



Kete



<b>7. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Penetapan Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan</b>
Target	1 Unit
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Unit / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 1.304.270.000
Realisasi Anggaran	Rp. 1.277.541.034,- / 97,95 %
Penerima Manfaat	Pelaku usaha Perikanan
Lokasi	Kota Tarakan
Keterangan	Fasilitasi Air Bersih
<b>DOKUMENTASI</b>	
	



<b>8. Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.04.1.05.0002</b>
Target	6 Unit
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	6 Unit / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 1.394.000.000,-
Realisasi Anggaran	Rp. 1.350.918.300,- / 96,91%
Penerima Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POKDAKAN Bahari Maju</li> <li>2. POKDAKAN Bahari Sejahtera</li> <li>3. POKDAKAN Berkah laut Borneo</li> <li>4. POKDAKAN Anugerah Alam Berkah</li> <li>5. POKDAKAN Imbaya Taka</li> <li>6. LPM tanjung harapan</li> </ol>
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Sei Bilal RT. 13 kel. Nunukan Barat (Pokdakan bahari maju jaya)</li> <li>2. Jl. Jamaker RT. 26, Kel Nunukan Selatan (Pokdakan Berkah Lautan Borneo)</li> <li>3. Jl. BNI Lama RT. 01 Kel, Nunukan Utara (Pokdakan Bahari Sejahtera)</li> <li>4. Jl. Tanjung RT. 12 Kel Nunukan barat (Pokdakan imbaya taka)</li> <li>5. Jl. Yos sudarso Kel Tjg harapan selatan (LPM Tanjung harapan)</li> </ol>
Keterangan	Lantai Jemur Rumput Laut 5 Unit dan Peningkatan Sarana dan prasarana Jalan Jeramba mamolo 1 unit

#### DOKUMENTASI



Foto lantai jemur rumput laut Jl. Lingkar



Foto lantai jemur rumput laut Jl. Sei Bilal RT. 13 Kel. Nunukan Barat



Foto lantai jemur rumput laut  
Jl.Tanjung RT.12 Kel. Nunukan  
Barat



Foto lantai jemur rumput laut Jl. BNI  
Lama RT 01, Kel.Nunukan Utara



<b>9.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.04.1.05.0004</b>
	Target	4 Unit
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	4 Unit / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 575.000.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 570.105.103,- / 99,15%
	Penerima Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POKDAKAN Sumber Rejeki</li> <li>2. POKDAKAN Rumput Laut Berkah</li> <li>3. POKDAKAN Beringin Jaya</li> <li>4. POKDANAN Usaha Mandiri Sedadap</li> </ol>
	Lokasi	Kab. Nunukan
	Keterangan	Sarana Budidaya Rumput Laut 2 Unit Hibah Uang Rp. 200.000.000,- Hibah Uang Rp. 35.000.000,-

### DOKUMENTASI









<b>10.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.04.1.05.0007</b>
	Target	20 Orang
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	40 Orang / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 100.000.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 99.998.000,-
	Penerima Manfaat	Pembudidaya Ikan
	Lokasi	Tarakan
	Keterangan	Pelatihan Pembuatan Probiotok bagi pembudidaya tambak tradisional udang windu di Provinsi Kaltara.

### DOKUMENTASI

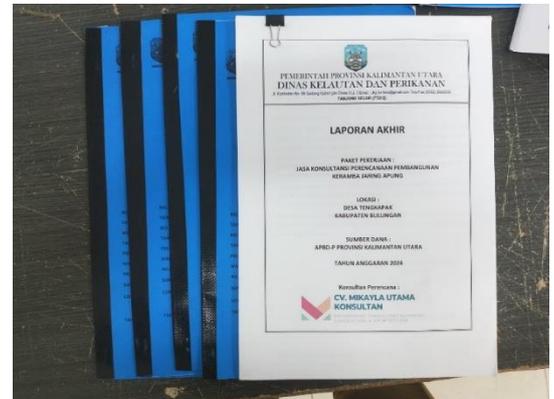






<b>11.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.04.1.06.0001</b>
	Target	1 Unit
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Unit / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 35.000.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 34.779.755,- / 99,37%
	Penerima Manfaat	Pembudidaya Ikan
	Lokasi	Bulungan
	Keterangan	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Keramba Jaring Apung

### DOKUMENTASI





<b>12.</b>	<b>Program Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.04.1.06.0002</b>
	Target	2 Unit
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	2 Unit / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 200.000.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 199.192.600,- / 99,60%
	Penerima Manfaat	1. POKDAKAN Petapa 2. POKDAKA Tunas Tambak
	Lokasi	Kota Tarakan
	Keterangan	Bibit Ikan Bandeng, Bibit Udang Windu

#### DOKUMENTASI





<b>13. Program</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.05.1.01.0002</b>
Target	1 Dokumen
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Dokumen / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 368.013.700,-
Realisasi Anggaran	Rp. 367.359.383,- / 99,82%
Penerima Manfaat	Pelaku Usaha Perikanan
Lokasi	Semua Kab/Kota dan Nunukan
Keterangan	1. Patroli Pengawasan 2. Rehabilitasi pos pengawasan SDKP

#### **DOKUMENTASI**





14.	<b>Program</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.05.1.01.0003</b>
	Target	1 Dokumen
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Dokumen / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 173.000.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 172.820.805,- / 99,90%
	Penerima Manfaat	Pelaku Usaha Perikanan
	Lokasi	Semu Kab/Kota
	Keterangan	Patroli Pengawasan

#### DOKUMENTASI





<b>15.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.05.1.01.0004</b>
	Target	10 Kelompok Masyarakat
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	10 kelompok masyarakat / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 4.308.779.965
	Realisasi Anggaran	Rp. 4.263.469.853,- / 98,60%
	Penerima Manfaat	POKMASWAS, Pengawas perikanan
	Lokasi	Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan
	Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perahu Pokmaswas = 5 Unit</li> <li>2. Perlengkapan Pokmaswas = 5 Pokmaswas</li> <li>3. Perlengkapan Pengawas Perikanan = 5 paket</li> <li>4. Speedboat Pengawasan SDKP 12 Meter = 1 Unit</li> </ol>

#### DOKUMENTASI

	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 100%; text-align: center;">  </div> </div>
	<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 5px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>



<b>16.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.05.1.02.0002</b>
	Target	1 Dokumen
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Dokumen / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 62.800.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 62.531.231,- / 99,57%
	Penerima Manfaat	Pelaku Usaha Perikanan
	Lokasi	Semua Kab/Kota
	Keterangan	Patroli Pengawasan

**DOKUMENTASI**





<b>17. Program</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>
<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.05.1.02.0003</b>
Target	1 Dokumen
Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	1 Dokumen / 100%
Anggaran (Rp)	Rp. 44.000.000,-
Realisasi Anggaran	Rp. 41.923.600,- / 95,28%
Penerima Manfaat	Pelaku Usaha Perikanan
Lokasi	Semua Kab.Kota
Keterangan	Patroli Pengawasan

**DOKUMENTASI**





<b>18.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.02.1.01.0002</b>
	Target	30.456,52 Ha
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	26.638,24 Ha / 96,30 %
	Anggaran (Rp)	Rp. 3.107.152.750,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 2.983.757.227,- / 96,03%
	Penerima Manfaat	Masyarakat Pesisir
	Lokasi	KK binusan & Sinelak, KK Tanjung Palas Timur.
	Keterangan	Peningkatan sarana dan prasaranan dikawasan konservasi binusan & sinelak dan KK Tanjung Palas Timur

#### DOKUMENTASI





<b>19</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.06.1.02.0004</b>
	Target	20 orang
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	20 Orang / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 262.540.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 459.087.091,- / 99,92%
	Penerima Manfaat	Masyarakat Pesisir
	Lokasi	Kota Tarakan
	Keterangan	Sosialisasi mitigasi bencana

### DOKUMENTASI





<b>20.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.02.1.03.0002</b>
	Target	5 Kelompok
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	5 Kelompok / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 107.850.050,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 108.723.798 / 99,98%
	Penerima Manfaat	Kelompok masyarakat pesisir
	Lokasi	Kab. Nunukan, Kab. Bulungan, Kota Tarakan
	Keterangan	Sosialisasi Matek Perairan Pesisir RZWP3K

#### DOKUMENTASI





<b>21.</b>	<b>Program</b>	<b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing</b>
	<b>Kode Sub Kegiatan</b>	<b>3.25.06.1.02.0002</b>
	Target	10 Unit Usaha
	Capaian Kinerja/Realisasi Fisik	10 Unit Usaha / 100%
	Anggaran (Rp)	Rp. 462.500.000,-
	Realisasi Anggaran	Rp. 459.087.091,- / 99,26%
	Penerima Manfaat	Masyarakat, UPI
	Lokasi	Nunukan
	Keterangan	Safari Gemarikan, Penyusunan FS kelayakan pembangunan Laboratorium Mutu Hasil Perikanan

#### DOKUMENTASI

